

LAPORAN TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : YONATAN ARDILAS

NIM : 126232131

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Yonatan Ardilas

126232131

Disetujui Oleh : Pembimbing

Andreas Bambang Daryatno S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Yonatan Ardilas

126232131

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi yang luas dan negara kesatuan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efisiensi fiskal penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menguji kemandirian fiskal daerah, ketergantungan fiskal daerah, derajat desentralisasi fiskal dan efisiensi pendapatan asli daerah. wilayah dan potensi pertumbuhan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dan deskriptif dalam rangka memberikan penjelasan dan gambaran mengenai kinerja fiskal Pemerintah Daerah Sulawesi Utara periode 2019-2023. Analisis didasarkan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019-2023, dan hasil penelitian untuk menganalisis kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari rasio kemandirian fiskal daerah, rasio ketergantungan fiskal daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan fiskal pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Singkatnya, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci: Otonomi, Pendapatan, PAD, Pemerintah Daerah, Kemandirian, Desentralisasi, Efektifitas, Ketergantungan, Pertumbuhan.

Analysis of Local Government Financial Performance of North Sulawesi Province

Yonatan Ardilas

126232131

ABSTRACT

The North Sulawesi Provincial Government carries out its governmental This study is based on the principle of autonomy in accordance with the concept of maximum possible autonomy in the institutions and principles of the Indonesian State, as stated in the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. This study is to assess the fiscal efficiency of local government by examining the independence of local finances, the dependence of local finances, the degree of fiscal decentralization and the efficiency of revenue. created by the local government, and regional growth in the North Sulawesi Provincial Government. This study employs explanatory and descriptive methods with the objective of providing an explanation and a comprehensive overview of the financial performance of the North Sulawesi Provincial Government during the 2019–2023 period. The results of the research, which analyze the financial performance of the regional government of North Sulawesi Province with the Government of North Sulawesi as the object of analysis for the 2019–2023 budget years, conclude that there are still several aspects that need improvement in the financial management of the North Sulawesi Provincial Government. These include regional fiscal independence ratio, regional fiscal dependence ratio, fiscal decentralization ratio, regional revenue efficiency ratio and regional revenue growth ratio.

Keywords: *Autonomy, Revenue, Locally Generated Revenue (PAD), Regional Government, Independence, Decentralization, Effectiveness, Dependency, Growth.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia yang senantiasa diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan karya akhir ini dengan baik. laporan Karya akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Pada proses penyusunan Laporan karya akhir ini penulis mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
2. Andreas Bambang Daryatno S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP selaku Dosen Pembimbing.
3. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara.
4. Seluruh keluarga penulis yang telah mendukung dari awal proses kuliah sampai pada tahap akhir.
5. Rekan seperjuangan mahasiswa PPAK Untar Batch 34 yang menjadi rekan berjuang bersama

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tugas belum sempurna sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari akademisi demi penyempurnaan karya tulis ini.

Jakarta, 1 Desember 2024

Yonatan Ardilas

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Pembahasan Teori	4
2.1.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	4
2.1.2.1 Pendapatan Daerah.....	5
2.1.3 Kinerja Keuangan.....	8
2.1.4 Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah..	8
2.1.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	9
2.1.4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	11
2.1.4.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	12
2.1.4.4 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.4.5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah..	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Metode Penelitian.....	15
3.3 Jenis dan Sumber Data	15
3.4 Metode Pengumpulan Data	15
3.5 Metode Analisa Data.....	15
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Tren Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi Utara.....	16
4.1.1 Pendapatan	16

4.1.2	Pendapatan Asli Daerah	17
4.1.3	Belanja Daerah	17
4.2	Analisis dan Pembahasan	18
4.2.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	18
4.2.2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	20
4.2.3	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	21
4.2.4	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah	22
4.2.5	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.....	23
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	24
5.1	Simpulan	24
5.2	Saran.....	25
	DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tingkat Kemandirian dan Pola Hubungan.....	10
Tabel 2	Kriteria Rasio Ketergantungan Daerah	12
Tabel 3	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal.....	13
Tabel 4	Tren Pendapatn Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2023.....	16
Tabel 5	Tren Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2023.....	17
Tabel 6	Tren Belanja Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2023	18
Tabel 7	Rasio Kemandirian Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2023.....	19
Tabel 8	Rasio Ketergantungan Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2023	20
Tabel 9	Rasio Derajat Desentralisasi Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2023.	21
Tabel 10	Rasio Efektifitas PAD Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2023	22
Tabel 11	Rasio Pertumbuhan PAD Provinsi Sulawesi Utara 2019 - 2023	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada tanggal 23 September 1964 oleh Undang-Undang No. 1964. 13 Tahun 1964. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari lima belas kabupaten dan kota. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan lokal, setiap daerah memiliki prioritas khusus yang sesuai dengan karakteristiknya. Untuk menentukan tujuan pembangunan wilayah, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab untuk membuat rencana pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RGWP), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (LTRP), dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (MTRP) adalah beberapa contoh rencana pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan program prioritas pembangunan tersebut, Provinsi Sulawesi Utara Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien diperlukan untuk memastikan bahwa Tujuan dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan verifikasi keuangan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap daerah harus mengelola sumber daya keuangannya secara bertanggung jawab, mematuhi peraturan perundang-undangan dengan cara yang efisien, hemat, efisien, dan transparan, dan mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kesesuaian. Dan itu harus bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Republik Indonesia. Menurut Laporan Keuangan 2006, pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun. Laporan ini digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah, mengaudit posisi keuangan, mengevaluasi dan memantau efisiensi dan efektivitas organisasi pelapor, dan mengevaluasi kinerja organisasi publik. Menurut Mahmudi (2019), analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang laporan keuangan. Ini juga membantu mereka memahami jumlah laporan keuangan, mengevaluasinya, dan menggunakannya untuk membuat keputusan.

Salah satu metode yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan. Para pengguna laporan keuangan harus dapat memahami hasil analisis laporan keuangan saat mereka membuat keputusan. Salah satu solusinya adalah melihat laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui seberapa baik mereka mengelola keuangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penelitian penulis diberi judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah mandiri dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah mandiri dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah?
3. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah mandiri dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
4. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah?
5. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah tumbuh dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, efektifitas pendapatan asli daerah dan pertumbuhan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk menghindari bias dan perbedaan persepsi mengenai penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah dan ruang lingkup agar tidak menyimpang dari topik yang menjadi sasaran penulis. Batasan dalam penelitian ini adalah Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2019 - 2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap agar hasil penelitian dapat digunakan untuk:

1. Memberikan informasi mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2019 - 2023.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan referensi untuk bahan pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. 2018. *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada pemerintah kota Tasikmalaya tahun 2006-2015)*. Jurnal Akuntansi, 13(1), 30-39.
- Faridatussalam, S. R. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 22(2), 71–76.
- Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Salemba Empat.
- Herisistam. 2015. *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Jakarta: UT Perpustakaan Digital.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2021. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlissa, A. S., Rofingatun, S., & Larasati, R. 2021. *The Effect Of Characteristics Of Local Governments And Bpk Audit Opinions On Financial Performance Of Local Governments (Empirical Study On Regencies/Cities In Papua Province In 2018-2019)*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 16(1), 71–83.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. 2017. *Analisis rasio keuangan anggaran APBD Kota Manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2011-2015*. Jurnal Accountability, 6(01).
- Purba, Sahala dkk. 2024. *Analisi Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir*. Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 5 No. 1 Bulan April 2024 – September 2024.
- Pramono, J. .2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Among Makarti, VII(13), 83-112.
- Yulianti, A. D. 2018. *Strategi penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif sumber penerimaan daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Economics Development Analysis Journal, 7(3), 268-275.